

Kepemimpinan Strategis di Masa Pemerintahan Joko Widodo Dalam Menyelesaikan Pandemi Covid-19 di Indonesia Untuk Mendukung Pertahanan Negara

Arditho Bramandika Putra¹ Pande Made Rony Kurniawan² Trismadi³ Andrian Andaya Lestari⁴

Fakultas Sains dan Teknologi Penginderaan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kota Sentul, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: arditho.putra@bmgk.go.id¹

Abstrak

Indonesia pada tahun 2020 - 2021 mengalami pandemi Covid-19. Tidak hanya di Indonesia, pandemi Covid-19 juga dialami hampir seluruh negara di dunia. Pandemi ini akibat adanya penyebaran virus corona, virus ini menyerang sistem pernafasan dan menimbulkan masalah kesehatan. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan guna melindungi bangsa Indonesia dan mewujudkan pertahanan negara. Kebijakan pemerintah yang pertama dikeluarkan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan melalui Peraturan Pemerintah. Kepemimpinan strategis merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk berfikir secara strategis dengan tujuan menciptakan perubahan yang lebih baik. Penerapan kepemimpinan strategis akan berpengaruh ada langkah strategis yang diambil oleh pemimpin. Pemerintah menunjukkan langkah strategis berupa mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penularan Covid-19, jaminan ketersediaan kebutuhan pokok, serta jaminan kesehatan. Kebijakan tersebut berdampak positif terhadap angka kasus positif Covid-19 yang menurun. Jika pemerintah terus mengambil dan menerapkan langkah strategis maka penyelesaian pandemi Covid-19 di Indonesia dapat diatasi dengan tepat dan cepat.

Kata Kunci: Covid-19, Kepemimpinan Strategis, Pemerintah, Pertahanan Negara



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan segala tindakan untuk memberi arahan dan melakukan koordinasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Suspurwanto, 2020). Kemudian strategi dapat diartikan sebagai rencana dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan (Wibowo & Puspitasari, 2021). Sedangkan mengantisipasi, membayangkan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja sama dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang layak bagi organisasi dikenal sebagai kepemimpinan strategis. (Suspurwanto, 2020). Berdasarkan dari definisi tersebut, kepemimpinan strategis merupakan konsep kepemimpinan dengan langkah - langkah strategis dengan melakukan koordinasi kepada orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dengan harapan membentuk masa depan yang layak untuk organisasi. Sehingga keberhasilan dari suatu organisasi bergantung kepada kepemimpinan yang diterapkan didalamnya.

Indonesia pada tahun 2020 - 2021 mengalami pandemi Covid-19. Tidak hanya di Indonesia, pandemi ini juga menyerang hampir seluruh negara di dunia. Pandemi ini akibat adanya penyebaran virus corona, virus ini menyerang sistem pernafasan dan menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan ringan, infeksi paru-paru parah, dan kematian. (Utomo & Hanita, 2020). Kasus Covid-19 ini pada awalnya ditemukan di wilayah Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2020 ditemukan kasus 2 orang yang terinfeksi di Indonesia (Pradana, et al, 2020). Covid-19 ini menyebar sangat

mudah, hingga September 2021 sudah 4,2 juta kasus terinfeksi dan jumlah kematian 141.826 orang karena Covid-19 di Indonesia, menurut data dari covid19.go.id. Pandemi Covid-19 ini perlu ditangani dengan strategi yang tepat agar rantai penularan dapat dihentikan dan menjaga pertahanan negara. Pemerintah Indonesia bergerak cepat sebagai pemangku kebijakan dimasa pandemi Covid-19 (Subagia, et al, 2020). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna melindungi bangsa Indonesia sebagai mana yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 termasuk dalam mendukung pertahanan negara. Hal ini dilakukan untuk menghentikan agar laju penularan serta pandemi Covid-19 di Indonesia dapat terselesaikan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dikaji lebih dalam sehingga mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian. Penulis juga melakukan studi literatur untuk mendukung penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan guna melindungi bangsa Indonesia. Kebijakan pemerintah yang pertama dikeluarkan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Wibawa & Putri, 2021). Pelaksanaan PSBB di lapangan beberapa diantaranya adalah meliburkan kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan tempat kerja, pembatasan kerumunan kegiatan di tempat umum baik itu kegiatan keagamaan maupun lainnya, dan pembatasan pada moda transportasi massal yang telah diatur melalui Permentan No. 9 Tahun 2020 tentang PSBB. PSBB merupakan kebijakan yang diterapkan untuk mencegah penularan Covid-19 yang mulai diberlakukan pada bulan April 2020 serta mengalami perpanjangan waktu beberapa kali menyesuaikan di lapangan, karena penyebaran Covid-19 masih tinggi. Angka penyebaran Covid-19 yang masih tinggi pada saat itu dikarenakan masih rendahnya kepatuhan masyarakat untuk menjalankan kebijakan pemerintah seperti tidak menaati protokol kesehatan. Dikutip dari laman covid19.go.id, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito (3/12/2020) memberikan statement, untuk menekan angka kasus positif dan kematian yang terjadi dikarenakan oleh Covid-19, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan harus 75% dari populasi, tetapi realita di lapangan hanya 59,20% kepatuhan yang dicapai.

Angka kasus positif dan kematian yang masih tinggi di lapangan membuat pemerintah membuat kebijakan baru. Pemerintah menerbitkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada pertengahan Januari 2021. PPKM ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021. Kebijakan PPKM ini tidak seketat kebijakan PSBB, pelaksanaannya seperti contohnya memberikan batas untuk kegiatan perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (WFH) 75% dan 25% kerja di kantor (WFO), kegiatan belajar mengajar secara daring/online, makan atau minum di restoran hanya diperbolehkan sebesar 25% dari kapasitas pengunjung serta jam operasional untuk pusat perbelanjaan dibatasi sampai dengan pukul 19.00 WIB. Selain kebijakan, pemerintah juga membentuk satgas melalui keputusan presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Satgas ini memiliki tugas untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap kasus Covid-19. Pembentukan satgas Covid-19 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk

menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyebaran virus Covid-19 (Amin, et al., 2020). Dengan demikian, melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran menerapkan pola hidup dalam mencegah penularan Covid-19 guna menyelesaikan pandemi.

Selain membuat kebijakan untuk pencegahan penularan Covid-19, pemerintah juga membuat kebijakan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak pandemi. Kebijakan tersebut diantaranya berupa menambah jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan dan kartu sembako, memberikan kompensasi listrik untuk pengguna 450 VA dan diskon 50% untuk pelanggan 900 VA selama 3 bulan serta memberikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal. Selain itu, pemerintah juga menjamin dibidang kesehatan seperti menambah fasilitas kesehatan, melakukan tes massal, memberikan pengobatan gratis bagi pasien Covid-19, serta pemberian vaksin gratis bagi masyarakat (Wibawa & Putri, 2021). Dikutip dari laman covid19.go.id, Vaksin Covid-19 memberikan perlindungan agar tidak tertular atau meminimalkan resiko akibat Covid-19 dengan cara kerjanya yaitu menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin dan juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok dalam masyarakat. Pemberian jaminan kebutuhan pokok dan kesehatan kepada masyarakat merupakan solusi pemecahan masalah atau kompensasi oleh pemerintah kepada masyarakat yang terdampak dari kebijakan yang dikeluarkan.

Langkah pemerintah dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 yang awalnya dianggap lamban sehingga penyebaran virus corona semakin tinggi dan tidak terkendali (Subagia, et al, 2020). Hal ini membuat pemerintah melakukan upaya seperti PSBB dan juga PPKM yang diadopsi dari negara-negara yang mampu menurunkan angka penyebaran Covid-19 (Wardhana & Timur, 2021). Upaya yang dilakukan pemerintah pun membuahkan hasil yang dibuktikan dengan menurunnya kasus positif Covid-19. Dilansir dari CNN Indonesia, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi (15/09/2021) mengungkapkan bahwa Indonesia mendapat apresiasi sebagai salah satu negara terbaik di dunia dalam penanganan Covid-19, karena dalam kurun waktu 2 minggu mampu menurunkan hingga 58% angka kasus positif. Kebijakan pencegahan penularan Covid-19 juga berdampak pada perekonomian akan tetapi pemerintah telah membuat strategi dan jalan keluar untuk mengatasi dampak tersebut dengan memberikan jaminan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat yang berdampak pandemi (Wibawa & Putri, 2021). Oleh karena itu, dampak positif dari upaya pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19, dapat dikatakan Pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan pandemi Covid-19.

KESIMPULAN

Kepemimpinan strategis merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk berfikir secara strategis dengan tujuan menciptakan perubahan yang lebih baik. Penerapan kepemimpinan strategis akan berpengaruh ada langkah strategis yang diambil oleh pemimpin. Pemerintah Indonesia menunjukkan langkah strategis berupa mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penularan Covid-19, jaminan ketersediaan kebutuhan pokok, serta jaminan kesehatan. Kebijakan tersebut berdampak positif terhadap angka kasus positif Covid-19 yang menurun. Jika pemerintah terus mengambil dan menerapkan langkah strategis maka penyelesaian pandemi Covid-19 di Indonesia dapat diatasi dengan tepat dan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M., Novianti, V., Sumberarha, I. W., Priambodo, B., Amin, A. Z., & Prihatnawati, Y. (2020). Pembentukan Satgas Siaga Covid dan Implementasi Tupoksi Satgas Desa Mulyoagung Kabupaten Malang. *Jurnal Graha Pengabdian*, 366-377.

- CNN Indonesia (2021). Penanganan Pandemi Covid di Indonesia Dapat Apresiasi Global. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210916102408-25-695119/penanganan-pandemi-covid-di-indonesia-dapat-apresiasi-global>
- Covid19.go.id (2020). Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Harus Ditingkatkan. Diakses dari <https://covid19.go.id/p/berita/kepatuhan-masyarakat-terhadap-protokol-kesehatanharus-ditingkatkan>
- Covid19.go.id. Peta Sebaran Covid-19. Diakses dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>.
- Pradana, A. A., Casman, & Nur'aini. (2020). Pengaruh Kebijakan Social Distancing Pada Wabah Covid-19 Terhadap Kelompok Rentan Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 61-67.
- Subagia, D., Santoso, I. A., Maryanti, M., & Ramadhani, R. M. (2020). Strategi Pemngambilan Keputusan Strategis dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Indonesia: Sebuah Literatur Review. *Jurnal Manajemen Bencana*, 65-74.
- Suspurwanto, J. (2020). Kepemimpinan Strategis Jenderal Sudirman Dalam Pengabdianya Sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Semesta*, 27-40.
- Utomo, D. W., & Hanita, M. (2020). Strategi Kepemimpinan Krisis dalam Mananggulangi Pandemi Covid-19 untuk Memastikan Katahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 208-226.
- Wardhana, W., & Timur, M. K. (2021). Analisis Kebijakan Publik Mengenai Penanganan Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Politics and Policy*, 141-156.
- Wibawa, P. A., & Putri, N. K. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Menangani COVID 19. *Ganesha Civic Education Journal*, 10-18.
- Wibowo, J. A., & Puspitasari, M. (2021). Kepemimpinan Strategis dalam Masa Krisis Pandemi Covid-19 (Belajar dari Pemimpin Daerah Kot Tegal). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 282-288.